

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman terus berkembang dan mengalami perubahan. Peradaban manusia dalam segala bidang kehidupan tak pernah tetap dan berhenti. Pendidikan disiapkan untuk menyongsong perubahan-perubahan tersebut (Istiqomah, 2018). Pendidikan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. Peran serta masyarakat sangat penting dalam pengelolaan satuan pendidikan. Semua tahap mulai dari merencanakan, mengorganisir, mengemas, melaksanakan, mengevaluasi serta menindaklanjuti suatu proses pendidikan harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan (Winoto, 2021). Masih menurut Winoto (2021), ada tiga permasalahan besar yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia. Pertama, tuntutan kualitas pendidikan. Hal ini tercermin pada besarnya tuntutan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan. Kedua, tantangan global, generasi yang akan datang dihadapkan pada perkembangan zaman *borderless* dunia tak lagi tersekat oleh batas teritori yang menuntut dunia pendidikan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas dan kemampuan kompetitif. Ketiga, diberlakukannya otonomi daerah yang menuntut perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang partisipatif, demokratis, dan transparan.

Indikator substansial dalam peningkatan mutu pendidikan adalah peran serta orang tua siswa, dan masyarakat yang mempunyai ketertarikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Peran mereka tidak hanya sebatas memobilisasi kontribusi material pendidikan, tetapi juga pada substansi penyelenggaraan mutu pendidikan.

Pada era perkembangan teknologi yang semakin maju, menuntut berbagai pihak untuk melakukan percepatan dan perubahan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan masa agar terus dapat memberi sumbangsih positif dan mengontrol perkembangan zaman dengan baik. Pendidikan adalah salah satu jalan untuk mempersiapkan generasi atau sumber

daya yang kompeten dalam melakukan pembangunan yang berkesinambungan dan maju. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mempersiapkan masa depan, sekolah dituntut untuk terus meningkatkan mutu melalui berbagai upaya dan pendekatan yang telah ditetapkan.

Pelbagai usaha peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tak kunjung berhenti dan usai. Berbagai gagasan dan pemikiran baru akan terus berproses sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Konsepsi baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya kompetitif pada tataran global. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu dikaji dan diperjuangkan

Kesempatan terbuka luas bagi daerah dan satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas sekolah sesuai kebutuhan, karakteristik dan kearifan lokal pada era otonomi daerah. Salah satu pendekatan yang berkembang dari otonomi daerah di bidang pendidikan adalah manajemen berbasis sekolah. Melalui manajemen berbasis sekolah, pimpinan atau kepala sekolah dapat melakukan kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu sekolah dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya komite sekolah. Komite adalah sekelompok orang yang diberi wewenang untuk melakukan tanggung jawab tertentu (terutama dalam hubungannya dengan pemerintahan) yang secara independen memikul tugas untuk merangkul, mewadahi, menyatukan visi misi, dan komponen-komponen pendidikan yang beranggotakan orang tua/ wali, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat pemerhati pendidikan (Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016).

Komite sekolah sebagai organisasi independen yang sengaja diinisiasi untuk secara aktif berkontribusi dalam berbagai aktivitas sekolah sesuai peran dan fungsinya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Komite sekolah dalam hal ini berperan sebagai pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai kontrol, sebagai mediator (Rosnani, 2021a). Keberadaan komite sekolah dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, menyentuh berbagai indikator kinerja demi keberhasilan sistem pendidikan. Untuk menjalankan perannya, komite bertugas dalam hal-hal Rosnani (2021a), sebagai berikut; (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu di sekolah; (2) melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat baik perorangan maupun kelompok dan pemerintah demi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (3) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (4) memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.

Selain itu juga, komite sekolah juga melakukan akuntabilitas (Rosnani, 2021a), sebagai berikut: (1) komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran; (2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan baik berupa materi (dana dan barang tak bergerak maupun bergerak) maupun non materi (tenaga dan pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

SMA Negeri 1 Cerme adalah salah satu sekolah yang sudah membentuk komite sekolah dan melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Lembaga pendidikan yang pada tahun 2020 telah mendapatkan peringkat akreditasi "A" dengan nilai 93. Sebagaimana diketahui, bahwa peringkat akreditasi tentunya diperoleh melalui hasil penilaian terhadap setiap standar pendidikan yang telah ditetapkan; Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (PP No. 19, 2005).

Pencapaian akreditasi oleh sekolah tentunya diharapkan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini juga diwujudkan melalui keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, yang dilakukan secara kolaboratif dan berperan secara baik pada tugas dan fungsi masing-masing, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan komite sekolah.

Namun demikian, pelaksanaan penyelenggaraan komite sekolah di SMA Negeri 1 Cerme juga memiliki permasalahan. Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan permasalahan yang muncul yakni permasalahan hubungan dan kerjasama. Penciptaan hubungan kerjasama yang baik atas dasar kedudukan yang sama dengan penuh kesadaran akan kewajiban mengabdikan pada bangsa dan

negara, secara khusus kesadaran dan kewajiban untuk membangun pendidikan nasional secara keseluruhan. Permasalahan yang dapat dirangkum, di antaranya masih terdapat sebagian besar keengganan orang tua peserta didik untuk hadir dalam rapat yang diadakan oleh pihak sekolah berkaitan dengan kemajuan pendidikan. Selain itu, masih ada sikap antipatif orang tua atas pendidikan anaknya bahwa dengan merasa tugasnya selesai apabila sudah menyekolahkan anaknya dan telah membantu membayar biaya partisipasi pendidikan (sumbangan komite sekolah), serta banyak lagi problematika pendidikan peserta didik yang tidak mendapat perhatian orang tua sebagai upaya membantu terciptanya proses pembelajaran yang efektif, berkualitas, inovatif dan bersaing dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Meskipun telah diupayakan oleh pihak sekolah, tetapi keterlibatan tersebut masih sebatas dalam bentuk dukungan dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, keterlibatan orang tua peserta didik dalam mengambil keputusan tentang program-program sekolah, proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah serta evaluasi program belum dapat terealisasi. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa untuk mengimplementasikan konsep komite sekolah itu sendiri sangat tidak mudah, karena dilihat dari berbagai pengalaman yang sudah terjadi di lingkup masyarakat. Kesulitannya bukan bersumber pada konsep komite sekolah yang kurang jelas, melainkan budaya berorganisasi di lingkungan masyarakat belum berkembang. Sebagaimana menurut Pantjastuti (2008:84) penting adanya kegiatan sosialisasi maupun penyusunan berbagai pedoman operasional bagi pelaksanaannya konsep pemberdayaan masyarakat bagi sekolah. Tetapi, pada kenyataannya organisasi komite sekolah sangatlah penting guna meningkatkan mutu pendidikan yang akan menjadikan suatu lembaga sekolah lebih berkualitas.

Kompri (2014:17) permasalahannya yaitu karena kurang terlibatnya masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Selain itu, permasalahan yang sering muncul adalah masih banyak anggota komite sekolah yang belum memahami fungsi dan peran dalam memajukan mutu pendidikan. Kemudian adanya keengganan kalangan

masyarakat untuk ikut mengembangkan dan memberdayakan komite sekolah sebagai bentuk penciptaan hubungan partisipatif antara masyarakat dengan sekolah.

Menurut penulis untuk meningkatkan kerjasama yang efektif antara pihak sekolah dan komite sekolah, maka pihak sekolah perlu melakukan konsolidasi lebih intensif dengan pihak komite sekolah, serta membangun komunikasi yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Dalam meningkatkan pengelolaan suatu lembaga, tidak hanya kepala sekolah saja yang berperan aktif, tetapi juga sekelompok masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, komite sekolah menjadi hal yang menarik untuk diteliti terkait keterlibatannya dalam meningkatkan mutu sekolah. SMA Negeri 1 Cerme, sebagai salah satu sekolah di Kecamatan Cerme yang telah mendapatkan akreditasi “A” pada tahun 2020, semakin menarik perhatian apakah dalam pencapaian akreditasi tersebut komite sekolah memiliki keterlibatan sesuai tugas dan fungsinya di sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada uraian di atas menarik untuk dikaji tentang peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cerme.

Berlatar belakang uraian di atas, dapat dipahami bahwa komite sekolah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan mutu sekolah. Namun, pada pelaksanaannya komite sekolah dibentuk dan difungsikan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal dari sekolah masing-masing dengan tetap merujuk pada teori dan regulasi yang ada.

Pada penelitian ini, keterlibatan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Cerme dibatasi pada peran komite sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai; pemberi pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai pengontrol, dan sebagai mediator bagi sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan fokus penelitian maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komite sekolah SMA Negeri 1 Cerme memberikan pertimbangan dalam meningkatkan mutu sekolah?
2. Bagaimana komite sekolah SMA Negeri 1 Cerme memberikan dukungan dalam meningkatkan mutu pendidikan?
3. Bagaimana komite sekolah SMA Negeri 1 Cerme melakukan pengontrolan dalam meningkatkan mutu pendidikan?
4. Bagaimana komite sekolah SMA Negeri 1 Cerme melakukan mediator dalam meningkatkan mutu pendidikan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, fokus penelitian dan rumusan masalah maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana komite sekolah SMA Negeri 1 Cerme memberikan pertimbangan dalam meningkatkan mutu sekolah
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana komite sekolah SMA Negeri 1 Cerme memberikan dukungan dalam meningkatkan mutu pendidikan
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana komite sekolah SMA Negeri 1 Cerme melakukan pengontrolan dalam meningkatkan mutu pendidikan
4. Untuk mendeskripsikan bagaimana komite sekolah SMA Negeri 1 Cerme melakukan fungsinya sebagai mediator dalam meningkatkan mutu pendidikan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan secara praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penambah kekayaan dalam khazanah keilmuan khususnya di Universitas Gresik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang membutuhkan, seperti:

1. Kepala sekolah, diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi yang

dapat dipertimbangkan dalam mengambil langkah-langkah strategis sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan;

2. Komite sekolah, diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi dalam meningkatkan peran dan fungsinya di sekolah sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan;
3. Pemerintah, diharapkan dapat menjadi informasi dan rujukan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan;
4. Peneliti berikutnya, diharapkan dapat menjadi informasi, bahan diskusi, serta rujukan yang dapat disitasi bagi peneliti berikutnya jika memiliki relevansi dengan penelitian ini.